

ABSTRAK

Rochmatul Ummah. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua dengan menggunakan indikator rasio keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio keuangan, yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Data penelitian diperoleh dari laporan realisasi APBD yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI pada periode tertentu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Nusa Tenggara relatif lebih efektif dalam mengelola PAD dibandingkan Pulau Papua, meskipun tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah. Sementara itu, pemerintah daerah di Pulau Papua menghadapi tantangan signifikan dalam hal efisiensi dan kemandirian keuangan, meskipun mendapatkan dukungan dana otonomi khusus yang besar.

Secara umum, kedua wilayah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, memperkuat basis pendapatan asli daerah, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Nusa Tenggara, Papua, Analisis Rasio Keuangan

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PULAU NUSA TENGGARA DAN PULAU PAPUA

Rochmatul Ummah (2025)



**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PULAU NUSA TENGGARA
DAN PULAU PAPUA**

Proposal Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Akuntansi (S.Ak.)



Disusun Oleh:

Rochmatul Ummah

(2023005)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua**” yang disusun oleh Rochmatul Ummah, Nomor Induk Mahasiswa 2023005 telah diperiksa dan disetujui untuk diuji ke sidang skripsi.

Jakarta, 20 April 2025

Pembimbing



Muhammad Aras Prabowo,
S.E, M.Ak

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal skripsi dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua**“ yang disusun oleh Rochmatul Ummah, Nomor Induk Mahasiswa 2023005 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada Kamis tanggal 30 Juli 2025 dan direvisi sesuai saran penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Jakarta, 30 Juli 2025

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis



Taufik Hidayadi, S.E., M.SI

NIDN : 0301027401

TIM PENGUJI:

1. M.Aras Prabowo,S.E.,M.Ak

NIDN : 0309099302

(Kaprosdi Akuntansi sekaligus pembimbing)

(Aras Prabowo)
21/8
25

2. Habsyah Fitri Aryani, S.Ak, M.Ak

NIDN : 0309099302

(Sekretaris Prodi Akuntansi)

(Habsyah Fitri Aryani)
21/8
25

3. Dr. Siti Khomsatun

NIDN : 2101058302

(Penguji 1)

(Dr. Siti Khomsatun)
21/8
25

4. Lusiana Putri Ahmad, M.Ak

NIDN : 0303109401

(Penguji 2)

(Lusiana Putri Ahmad)
21/8
25

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rochmatul Ummah

NIM : 2023005

Tempat/Tgl.Lahir : Kendal, 04 Januari 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua” adalah hasil karya asli penyusun, bukan hasil plagiat, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya dan atas arahan pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyusun dan bersedia apabila gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Agustus 2025



Yang membuat pernyataan

ABSTRAK

Rochmatul Ummah, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua. Skripsi. Jakarta: Program Studi Akuntansi. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua dengan menggunakan indikator rasio keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio keuangan, yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Data penelitian diperoleh dari laporan realisasi APBD yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan RI pada periode tertentu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Nusa Tenggara relatif lebih efektif dalam mengelola PAD dibandingkan Pulau Papua, meskipun tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah. Sementara itu, pemerintah

daerah di Pulau Papua menghadapi tantangan signifikan dalam hal efisiensi dan kemandirian keuangan, meskipun mendapatkan dukungan dana otonomi khusus yang besar.

Secara umum, kedua wilayah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, memperkuat basis pendapatan asli daerah, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Nusa Tenggara, Papua,
Analisis Rasio Keuangan

ABSTRACT

Rochmatul Ummah, Comparative Analysis of the Financial Performance of Local Governments of Nusa Tenggara Island and Papua Island. Thesis. Jakarta: Accounting Study Program. University of Nahdlatul Ulama Indonesia 2025.

This study aims to analyze and compare the financial performance of local governments in Nusa Tenggara and Papua Islands using financial ratio indicators.

The research employed a descriptive quantitative method with a financial ratio analysis approach, including regional financial independence ratio, local revenue (PAD) effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratio. The data were obtained from the Regional Budget Realization Reports (APBD) published by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, for a specific period.

The results indicate that local governments in Nusa Tenggara perform relatively more effectively in managing local revenues compared to Papua, although their fiscal independence remains

low. On the other hand, local governments in Papua face significant challenges in terms of efficiency and fiscal independence, despite receiving substantial support from special autonomy funds.

Overall, both regions still face challenges in improving fiscal independence. Local governments need to optimize local resource potential, strengthen the local revenue base, and enhance financial management capacity to reduce dependency on central government transfers.

Keywords:

Financial Performance, Local Government, Nusa Tenggara, Papua, Financial Ratio Analysis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyusun skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana selalu menjadi petunjuk cahaya bagi umatnya dan senantiasa dinanti-nantikan syafaatnya diakhirat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 (S1) dalam bidang akuntansi (S.Ak) dalam program studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Dan Papua”. Skripsi ini disusun tidak lepas dari pihak-pihak yang sudah berperan dalam memberikan dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Syahrizal Syarif MPH,Ph.D, Selaku PLT Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
2. Bapak Taufik Hidayat, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

3. Bapak Muhammad Aras Prabowo, S.E, M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta dan sekaligus sebagai Dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Habsyah Fitri Aryani, S.Ak, M.Ak selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Dosen-dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang telah memberikan masukan kepada praktikan.
6. Bapak, Ibu, Adik dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun material.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan masukannya kepada penulis dalam proses penyusunan laporan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat demi terselesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan namun penulis berharap segala kekurangan dan kelebihan laporan skripsi ini, tidak mengurangi kebermanfaatan untuk semua pihak. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta 24 April 2025

Yang membuat pernyataan

Rochmatul Ummah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ivix
DAFTAR ISI	xii xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penelitian	2
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Rumusan Masalah Penelitian	15
1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Berpikir.....	42
2.4 Hipotesis Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Jenis Data	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data	49
3.4 Definisi Operasional Variabel	50

3.5	Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		59
4.1	Gambaran Umum	59
4.2	Deskripsi Data.....	65
4.3	Uji Asumsi Klasik	75
4.4	Pengujian Hipotesis.....	78
4.5	Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP		96
5.1	Kesimpulan	96
5.2	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 5 Kriteria Keserasian Belanja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian	51
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Efektivitas, Efisiensi dan Keserasian Belanja Daerah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022.....	66
Tabel 4. 2 Perbandingan Rata Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022	68
Tabel 4. 3 Perbandingan Rata Rata Rasio Kemandirian antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022.....	69
Tabel 4. 4 Perbandingan Rata Rata Rasio Efektivitas antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022.....	71
Tabel 4. 5 Perbandingan Rata Rata Rasio Efisiensi antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022.....	72
Tabel 4. 6 Perbandingan Rata Rata Rasio Keserasian Belanja Operasi antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022	73
Tabel 4. 7 Perbandingan Rata Rata Rasio Belanja Modal antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022.....	74
Tabel 4. 8 Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov	76
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hipotesis	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ekonomi Indonesia.....	10
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan dan partisipasi suku bangsa. dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perkembangan undang-undang ini juga didasari oleh gagasan perlunya menyempurnakan penyelenggaraan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Haryono et al., 2023).

Perkembangan ilmu akuntansi khususnya di Indonesia kini terjadi semakin pesat ditambah dengan munculnya tahap terkini dalam terwujudnya pengelolaan keuangan daerah. Tergantung dari

pengelolaan keuangan yang akan dilakukan, pengelola keuangan daerah tentu mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi daerah, mereka bisa menjadi semakin berkuasa atau menjadi tidak berdaya tergantung pada tindakan mereka dalam mengelola keuangan (Puspita Geatri Br Perangin-Angin et al., 2023).

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perusahaan paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perbaikan dan penguatan desentralisasi fiskal ini dilakukan melihat tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah dua dasawarsa lebih sejak dilaksanakannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Pertama, perlunya optimalisasi pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar penggunaan dana dan capaiannya lebih baik dan efektif. Saat ini, 45,6% penerimaan pajak dan bukan pajak dikembalikan ke daerah melalui belanja TKDD, terus meningkat sejak 2001. Namun, masih terdapat

masalah seperti hasil Pembangunan daerah tidak sesuai harapan, dan pola belanja pemerintah daerah yang tidak fokus dan tidak efektif (Meinasari A, A., Harsanto, 2022).

Langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia dengan meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, implementasinya bukannya tanpa tantangan. Permasalahan seperti ketidakseimbangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas ditingkat daerah, serta rumitnya koordinasi antar pemerintah daerah merupakan beberapa kendala utama yang perlu diatasi. Kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi yang rumit antara pemerintah daerah dan perlunya pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional merupakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan tuntutan akan layanan publik yang berkualitas, semakin penting untuk memahami

bagaimana desentralisasi dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Suriadi et al., 2024).

Suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi basis utama pendapatan daerah dibandingkan dengan dana transfer dari pusat dan provinsi. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Pusat, 2004b). Pendapatan daerah meliputi seluruh jumlah yang diterima melalui rekening kas umum daerah, ditambah dengan penyertaan dana yang ada, yang merupakan kepentingan daerah selama tahun anggaran yang tidak wajib dibayar kembali oleh daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Pusat, 2019). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2020) pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan kas

yang menjadi kewenangan daerah dan dicatat sebagai tambahan nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran ketika pemerintah tidak perlu lagi membayar (Hadi & Khotimah, 2022). Pendapatan daerah meliputi pendapatan awal daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan awal daerah lainnya (Hadi & Khotimah, 2022).

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Namun kenyataannya masih banyak daerah yang mengandalkan transfer modal dari pemerintah pusat karena rendahnya PAD. Fenomena tersebut perlu dikaji, karena berdasarkan data yang ada, potensi perekonomian daerah untuk pengembangan PAD masih cukup besar, namun potensi tersebut belum dapat digali dengan baik. Hal ini menjadikan aspek keuangan daerah otonom menjadi isu yang paling penting untuk dikaji, kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota (Yurika Aulia et al., 2024).

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Selain rasio *independen*, terdapat rasio lain yaitu rasio efektif. Rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan daerah yang direncanakan semula dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan daerah, rasio efisiensi saja tidak cukup, oleh karena itu rasio efisiensi PAD dihitung karena rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam berkoordinasi merasionalkan biaya-biaya yang harus ditanggung pemerintah. Rasio efisiensi juga menggambarkan perbandingan antara jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan sebenarnya yang diterima. Efisiensi pengumpulan anggaran pemerintah daerah dianggap efektif apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Semakin rendah rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemanfaatan keuangan dicapai melalui belanja daerah. Belanja daerah dapat

dibedakan menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer (Falih & Nurmiati, 2024).

Kinerja keuangan suatu pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu kegiatan yang mencakup anggaran dan pencapaian PAD dengan indikator keuangan yang ditetapkan secara sah selama satu periode anggaran. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Pusat, 2005). Kinerja keuangan suatu pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu kegiatan, termasuk anggaran dan pencapaian PAD dengan indikator keuangan yang ditetapkan secara sah selama tahun anggaran. Karena tuntutan masyarakat akan suatu bentuk akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah daerah diminta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang

kinerja mereka. Penilaian kinerja harus mampu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memantau efektivitas kinerja keuangan daerah. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas Dalam pengelolaan keuangan daerah, harus disampaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tepat waktu dan disiapkan sesuai dengan standar akuntansi negara (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024a).

Analisis rasio merupakan alat kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek seperti efisiensi, likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas suatu perusahaan. Analisis ini penting agar investor dan manajemen dapat memahami tren dan mengambil keputusan yang tepat. Analisis rasio memberikan wawasan tentang posisi keuangan perusahaan dan membantu mengidentifikasi potensi risiko atau peluang. Rasio ini sesuai berdasarkan industri tertentu dan berguna ketika membandingkan kinerja suatu perusahaan dengan rata-rata industri atau dengan

perusahaan lain dalam industri yang sama (Falih & Nurmiati, 2024).

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan yang tertuang dalam APBD. Terdapat kegunaan dari analisis rasio keuangan yang menyatakan bahwa, pertama untuk menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, kedua untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, ketiga untuk mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, keempat untuk mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, kelima untuk melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama satu periode tertentu.



Sumber: (Ramadhian et al., 2023)

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan gambar di atas yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan pertumbuhan dan kontribusi menurut wilayah. Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memberikan kontribusi perekonomian terendah di Indonesia sebesar 2,75% dan

2,62%. Pulau Maluku dan Papua terlihat memberikan kontribusi perekonomian rendah, namun dilihat dari segi pertumbuhan tinggi sebesar 12,15%. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan pertumbuhan paling rendah yaitu negatif 1,54%. Ekonomi Papua tahun 2023 tumbuh sebesar 5,22%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,37%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 6,51% Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024, dari (Siagian et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan objek pemerintah daerah tidak hanya satu daerah pulau yang ada di Indonesia, melainkan terdapat dua pulau yang akan diteliti yaitu ada Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua. Sebab meneliti dua pulau tersebut karena berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa dua pulau tersebut mengalami tingkat kontribusi perekonomian terendah. Dengan melihat tingkat kinerja keuangan pada kedua pulau tersebut

diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perbandingan tingkat kinerja keuangan antara Pulau Nusa Tenggara dan Papua. Berdasarkan uraian tersebutlah penulis menjadi tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul yaitu “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua**”. Judul ini diambil karena peneliti menganggap bahwasanya perlu dianalisis dan melakukan perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam menganalisis suatu laporan keuangan daerah dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan keuangan daerah yang tentunya dihadapi pemerintah daerah yang berkaitan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah, permasalahan tersebut meliputi:

1. Masih bergantungnya pemerintah di daerah terhadap subsidi pemerintah pusat yang dapat dilihat dari besarnya transfer

pemerintah pusat dari anggaran rutin maupun dari anggaran pemerintah daerah;

2. Kemampuan daerah yang masih rendah dalam menggali potensi dari sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer;
3. Kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang ada yang masih kurang;
4. Belanja daerah yang masih kurang efisien.

Hasil dari analisis rasio keuangan daerah dalam penelitian nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan yang dilihat dari beberapa rasio seperti: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian. Dengan diberikannya hasil dari analisis kinerja keuangan tersebut, dapat menggambarkan perbandingan suatu kinerja keuangan daerah dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada intinya

akan menggambarkan bagaimana kondisi Kinerja Keuangan Daerah pada Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah Provinsi di pulau Nusa Tenggara dan Papua?

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua ditinjau melalui tingkat rasio derajat desentralisasi fiscal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keuangan daerah dan rasio keserasian berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah provinsi di pulau Nusa Tenggara dan Papua.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua ditinjau melalui tingkat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua yang dapat ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lembaga pemerintahan daerah khususnya Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua, diharapkan dapat menjadikan rekomendasi dalam menganalisis kinerja keuangan untuk meningkatkan kualitas kerja

yang efektif dan efisien guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- b. Untuk Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan luas akan pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya;
- c. Untuk tokoh masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk transparansi kinerja keuangan dan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini supaya lebih terarah maka disusun sistematika penulisan yang dibagi menjadi tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang Penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batas atau ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori yang menjelaskan mengenai pengertian dasar yang diambil dari berbagai sumber penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Dalam bagian bab IV ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang menjadi fokus peneliti

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab V dari penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran saran atas fokus penelitian yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

2.1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah, menurut Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Pemerintah Pusat, 1974) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Pusat, 1999) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sugianto et al., 2020). Otonomi daerah, menurut Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Pusat, 2004a), bertujuan untuk

memperkuat persatuan dan kesatuan dengan mendorong pemerataan hasil pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong inisiatif dan partisipasi partisipasi aktif masyarakat, serta mendorong pemanfaatan dan integrasi potensi daerah secara optimal dan cara yang bertanggung jawab (Santoso et al., 2021).

Otonomi, secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris ‘*autonomy*’ atau ‘*autonomie*’ dalam bahasa Belanda. Otonomi adalah hak untuk mengatur sendiri (*self governance*), untuk dapat mengatur sendiri dan mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Jika dilekatkan pada predikat “daerah”, maka otonomi adalah hak daerah untuk mandiri dan leluasa menjalankan pemerintahan daerahnya. Kekuasaan daerah otonom mencakup hak untuk menyelenggarakan dan mengatur segala urusan yang berada di bawah kewenangannya. Dalam sistem negara kesatuan, otonomi daerah tidak dapat dipahami sebagai kedaulatan. Kedaulatan hanya milik negara dan tidak terbagi antar wilayah. Oleh karena itu, otonomi daerah lebih menekankan pada kebebasan dan kemandirian daerah untuk menjamin

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga Otonomi daerah harus dipandang sebagai subsistem negara (Machmoed et al., 2021).

2.1.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah untuk memudahkan pelaksanaan kekuasaan oleh daerah, sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut berdampak positif terhadap penanaman modal. Penanaman modal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah dan meningkatkan pendapatan daerah, namun otonomi daerah sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah terutama dalam perizinan sehingga investor menemui kesulitan dan hambatan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memberikan dampak positif dan memberikan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat, penyederhanaan pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal dan penyederhanaan pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian (mulai dari regulasi) untuk membantu kemudahan berusaha bagi badan usaha, karena deregulasi untuk meningkatkan efisiensi bagi badan usaha. Kepastian proses administrasi dan

kepastian hukum dapat menjamin keamanan daerah dan stabilitas politik, sinkronisasi peraturan antara pemerintah daerah dan pusat (Yuniza et al., 2022).

Dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut (Maharani et al., 2023).

1. Dari Segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah;
2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat;
3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga

masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya;

4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dengan demikian, inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri.

2.1.2 Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah sebagai mana dimulai dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Pusat, 2004a) “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Nasir, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” (Irnawati,saripuddin D, 2023).

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, keuangan daerah bersumber dari berbagai penerimaan atau pendapatan daerah (Santoso et al., 2021).

Adapun sumber pendapatan keuangan daerah adalah sebagai berikut (Zukhri, 2020):

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak, retribusi, laba BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan PAD yang sah lainnya;
2. Dana perimbangan
3. Sisa anggaran daerah
4. Dana cadangan
5. Hasil dari penjualan kekayaan daerah

6. Pendapatan daerah lainnya yang sah

2.1.2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan suatu pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu kegiatan yang mencakup anggaran dan pencapaian PAD dengan indikator keuangan yang ditetapkan secara sah selama satu periode anggaran. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD . Karena tuntutan masyarakat akan suatu bentuk akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah daerah diminta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja mereka. Penilaian kinerja harus mampu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memantau efektivitas kinerja keuangan daerah. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, harus disampaikan laporan keuangan dan laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah tepat waktu dan disiapkan sesuai dengan standar akuntansi negara (Eko Amanda & Zulgani, 2020).

Adapun tujuan dilakukanya pengukuran kinerja Keuangan daerah secara umum adalah (Hadi & Khotimah, 2022):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah;
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan;
3. Mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

A. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan perbandingan antara tingkat pendapatan awal daerah dengan total pendapatan daerah, terkait desentralisasi fiskal semakin tinggi kontribusi pendapatan awal daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (TPD), maka semakin tinggi pula

kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Anggun et al., 2023).

Derajat desentralisasi digunakan untuk menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah, dan menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Formula derajat desentralisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval DDF	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Anggun et al., 2023)

Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DDF} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF: Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt: Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt: Total Pendapatan Daerah tahun t

B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah yakni kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai dukungan masyarakat, pembangunan, dan kegiatan pemerintahan dengan menggunakan pajak dan sumber pajak disebut kemandirian fiskal daerah. Kapasitas ini diukur dengan membandingkan PAD dengan sumber pendapatan lain, seperti pinjaman daerah dan dukungan pemerintah pusat atau provinsi (Hadi & Khotimah, 2022).

Kinerja pemerintah daerah dikatakan semakin baik jika tingkat kemandirian mendekati 100% (delegatif). Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPTt}} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PADt: Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPTt: Total Pendapatan Transfer tahun t

Tabel 2. 2 Pola Hubungan dan Tingkat

Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: (Jarkasih et al., 2020)

Keterangan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah:

- 1) Instrukturif, Pemerintah Pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan daripada Pemerintah Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah masih belum mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah;
- 2) Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah;
- 3) Partisipatif, campur tangan pemerintah pusat sangat berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah mendekati kata mampu dalam melaksanakan otonomi daerah;

- 4) Delekatif tidak ada campur tangan pemerintah pusat sangat berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu melaksanakan otonomi daerah.

C. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan capaian PAD sesuai anggaran yang telah diidentifikasi dan kemudian membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2010). Cara menghitung tingkat efektivitas adalah dengan membandingkan PAD yang diterima dengan target yang telah ditetapkan (Hadi & Khotimah, 2022). Kinerja keuangan daerah semakin efektif jika mendekati angka rasio 100%. Rumus menghitung efektivitas daerah otonom diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

*Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah*

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Asri, 2022)

Keterangan:

- 1) Sangat efektif, pemerintah daerah sangat mampu untuk memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan apa yang ditargetkan;
- 2) Efektif, pemerintah daerah mampu untuk memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan;

- 3) Cukup Efektif, pemerintah daerah sudah mulai bisa memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan;
- 4) Kurang efektif, pemerintah daerah belum bisa memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan;
- 5) Tidak efektif, pemerintah daerah tidak bisa memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan.

D. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Perolehan ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Syukur, 2021).

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: (Syukur, 2021)

Keterangan:

- 1) Tidak efisien, berarti pengeluaran biaya untuk mendapatkan realisasi pendapatan lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang akan diterima;

- 2) Efisien, berarti pengeluaran biaya untuk mendapatkan realisasi pendapatan sama dengan realisasi pendapatan yang akan diterima;
- 3) Sangat Efisien, berarti pengeluaran biaya untuk mendapatkan realisasi pendapatan lebih kecil dari ada realisasi pendapatan yang akan diterima.

E. Rasio Keserasian

Rasio keserasian belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Terdapat dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Berikut ini merupakan rumus rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Terkait perhitungan rasio belanja dan rasio operasi dalam mengukur besarnya alokasi dana dapat diukur dengan menggunakan formula berikut ini:

Tabel 2. 5 Kriteria Keserasian Belanja

Sumber: (Waruwu, 2023)

Perbandingan	Kriteria Keserasian
Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal	Kurang Baik
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Modal	Cukup Baik
Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal	Baik – Sangat Baik

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting digunakan sebagai bahan acuan dalam proses penelitian yang sedang dilaksanakan. Tinjauan penelitian terdahulu, bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian. Dalam hal ini penelitian yang diajukan penulis akan dibandingkan sehingga perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan perbedaan yang terdapat pada keduanya.

NO	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Analisis Perhitungan	Hasil
1	Idna Hadi, Husnul Khotimah (2022)	Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Pulau Jawa dan Sumatera	Rasio Keuangan (Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi)	Adanya perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian dan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata baik pada rasio efektivitas maupun rasio efisiensi.

2	Novalia Afri, Nelly Masnila, M. Husni Mubarak (2023)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	Rasio Keuangan (Rasio Pertumbuhan, Rasio Belanja Modal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Belanja Operasi, Dan Rasio Efisiensi)	Terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata rasio pertumbuhan dan rasio belanja modal. Sedangkan untuk rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio belanja operasi dan rasio efisiensi belanja tidak berbeda sebelum dan saat pandemic Covid-19.
3	Bertilia Lina Kusrina, Fikriyyah Agustina, Gatot Subiyakto, Ira Phajar Lestari (2023)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah	Analisis Pendapatan Daerah (Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Efektivitas Pad), Analisis Belanja Daerah (Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Keserasian	Tidak ada perbedaan antara rasio ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, maupun derajat desentralisasi. Perbedaan rasio pertumbuhan belanja

			Belanja Operasi, Rasio Keserasian Belanja Modal Dan Rasio Efisiensi)	terhadap PDRB, keserasian belanja operasi, dan keserasian belanja modal dapat dilihat pada rasio belanja daerah baik sebelum maupun sesudah pemekaran.
4	Albert R. Rieuwpassa , Maryam Mangantar, Joubert B.Maramis (2021)	Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Di tiga Kota Di Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon)	Rasio Keuangan (Rasio Kemandirian Desentralisasi, Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan, Ketergantungan, Dan Keserasian	Test hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon tidak terdapat perbedaan.

5	Hery Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Rasio Keuangan (Rasio Efektifitas, Efisiensi, Kemandirian Keuangan Daerah, Aktifitas Dan Pertumbuhan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi
---	---------------------	--	---	---

				belanja operasi lebih besar dari belanja modal.
6	Rini Utari, Anisa Nursyabani , Hurun In, Royke Bahagia Rizka, Sandy Kurniawan (2023)	Analisis Kinerja Keungan Pemerintah Daerah Dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas	Rasio Keuangan (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Rasio Efektivitas)	Temuan analisis untuk menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal skala interval dari 0%- 10% (sangat sedikit). Rasio kemandirian jatuh antara 0-25% (sangat rendah dan instruktif. Rasio efektifitas tahun 2021 berada pada skala interval $x > 100\%$ (efektif)

				namun pada tahun 2022 berada pada skala interval $x < 100\%$ (tidak efektif)
7	Hertin Khalifatun Nisa Arifah, Nurul Hidayat, Samsul Arifin (2023)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penerima Otonomi Khusus pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2017-2021	Rasio Keuangan (Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Dan Pertumbuhan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian sangat rendah dengan tinggi tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal, rasio efektivitas sangat tinggi, maka rasio efisiensi menunjukkan PAD tidak efisien, rasio pertumbuhan

				menunjukkan tren yang fluktuasi.
8	Rahmat Arfan, Geta Ambartiasari, Indra Akbar, Nurvira Nanda (2023)	Analisis Rasio Pendapatan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah pada Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020	Rasio Keuangan (Rasio Derajat Desntralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah Dan Rasio Kemandirian)	Hasil pada penelitian ini rasio derajat desentralisasi dianggap belum baik karena kriteria cukup, pada rasio ketergantungan daerah menunjukkan kriteria sangat baik, pada rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria rendah.
9	Linus A. Ch Sakan (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keungan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rasio Keuangan (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Dan Rasio Aktivitas Belanja Daerah)	Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah memperoleh interfal di bawah 25% (rendah), rasio efektifitas PAD pada interfal di atas

				100% (sangat efektif), rasio efisiensi PAD pada interfal di bawah 60% (sangat efisien) dan rasio aktivitas belanja daerah menunjukkan lebih diprioritaskan pada belanja rutin dari pada belanja modal.
10	Nuzul Nikmatul Ula, Risma Wira Bharata (2022)	Analisis Rasio Keungan Dalam APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020)	Rasio Keuangan (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pad Dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah)	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah tergolong kurang efektif, rasio efisiensi belanja dipandang telah melakukan pemborosan anggaran.

2.3 Kerangka Berpikir

Menganalisis dan perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua merupakan proses penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kinerja keuangan dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisis dan perbandingan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua peneliti menggunakan lima rasio, rasio tersebut antara lain:

Pertama menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yang dihitung berdasar perbandingan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total Pendapatan Daerah. Rasio ini menjelaskan besarnya PAD dalam berkontribusi terhadap Total dari Pendapatan Daerah tersebut. Rasio ini menjelaskan kondisi bilamana besarnya kontribusi PAD tinggi, maka yang terjadi adalah tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam terselenggaranya desentralisasi juga akan semakin tinggi.

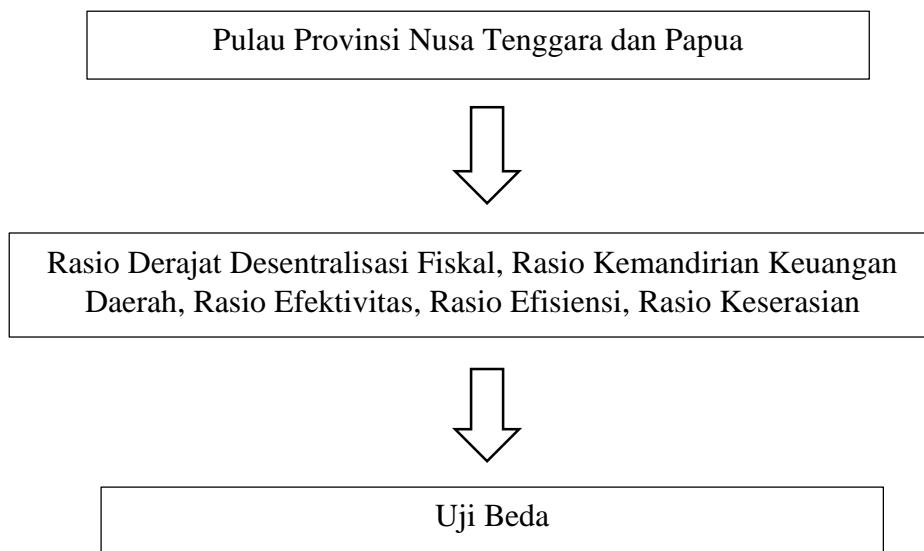
Kedua yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio ini dapat dihitung dengan cara perbandingan antara besarnya jumlah

penerimaan PAD terhadap besarnya jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Ketiga Rasio Efektivitas PAD, rasio ini menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Keempat Rasio Efisiensi PAD, rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, maka semakin kecil rasio ini maka semakin efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD.

Kelima Rasio Kecerahan, rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Selain menganalisis rasio keuangan pemerintah daerah provinsi di Pulau Nusa Tenggara dan Papua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Nusa Tenggara dengan Papua. Pulau Nusa Tenggara dan Papua memberikan kontribusi perekonomian terendah di Indonesia sebesar 2,75% dan 2,62%. Pulau Papua terlihat memberikan

kontribusi perekonomian rendah, namun dilihat dari segi pertumbuhan tinggi sebesar 12,15% *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024, dari (Monalisa & Indriasari, 2022)

Setelah ditinjau dari tujuan penelitian, kajian teoritis, dan juga beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut ini:

H1: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kinerja keuangan di Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua;

H2: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kinerja keuangan di Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua;

H3: Rasio Efektivitas Keuangan Daerah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kinerja keuangan di Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua;

H4: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kinerja keuangan di Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua;

H5: Rasio Keserasian Keuangan Daerah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kinerja keuangan di Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan desain yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral, dan valid. Metodologi penelitian adalah strategi untuk mengumpulkan data dan menemukan solusi masalah berdasarkan fakta (Waruwu, 2023). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis menggunakan data berupa angka. Alasan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan bermula dari sebuah teori menuju data dalam bentuk angka dan berakhir pada hasil yang telah diuji kebenarannya. Penelitian kuantitatif ini bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data. Penelitian statistik ini memegang peran sangat penting sebagai alat untuk menganalisis jawaban suatu masalah, sedangkan pengertian dari metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan teknik *statistic*. Metode kuantitatif berkaitan dengan angka atau nominal yang sering

digunakan pada penelitian survei atau jajak pendapat (Waruwu, 2023).

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan menggunakan skala interval, seperti laporan keuangan (Monalisa & Indriasari, 2022). Data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua tahun 2019-2022.

Objek penelitian ini adalah pemerintah provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua dengan data penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019-2022 yang didapat dari laman resmi masing-masing provinsi dan laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan yang terdiri dari objek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Rahayu, 2020). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh provinsi yang ada di Pulau Nusa Tenggara dan Papua.

3.2.1.2 Sampel

(Rahayu, 2020) mendefinisikan bahwa sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi besar maka penelitian menggunakan sampel dari populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu Provinsi di Pulau Nusa Tenggara dan Papua yang ada laporan keuangan dari tahun 2019-2022.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang berbentuk dokumentasi. Peneliti akan menganalisis data statistik yang berbentuk angka baik digali secara langsung dari hasil penelitian maupun

penelusuran data online. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Monalisa & Indriasari, 2022).

Jadi, dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan instansi Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua tahun 2019-2022, kemudian melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non keuangan.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel dependen yang memiliki hubungan positif ataupun negatif. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi

(Rahayu, 2020). Variabel independent dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Rasio Derajat Desentralisasi (X1)	Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.	$(PAD / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$	Rasio
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3)	Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer pusat, provinsi serta pinjaman daerah.	$(PAD / (\text{Dana Transfer} + \text{Pembiayaan})) \times 100\%$ atau bisa $(PAD / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$	Rasio
Rasio Efektivitas PAD	Efektivitas realisasi PAD terhadap target	$(\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%$	Rasio
Rasio Efisiensi	Perbandingan output (realisasi) dengan input (anggaran)	$(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$	Rasio

Keuangan Daerah			
Rasio Keserasian Belanja Daerah	Proporsi belanja operasional dan belanja modal	Belanja Operasional: (Belanja Operasional / Total Belanja Daerah) × 100%	Rasio

Sumber: (Wibawa & Arif, 2022)

Tabel 3.1 menggambarkan operasionalisasi variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian dengan judul "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua*". Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai indikator dan rumus yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel, serta skala yang digunakan dalam analisis data.

Variabel pertama adalah Rasio Derajat Desentralisasi (X1). Variabel ini digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah mampu menghasilkan pendapatan sendiri dibandingkan dengan total penerimaan yang diterima, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari transfer pusat. Rasio ini dihitung dengan rumus (*Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah*) ×

100%. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yang menandakan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Skala pengukuran untuk variabel ini adalah rasio.

Selanjutnya, variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa tergantung pada dana dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung melalui perbandingan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah transfer dari pusat, provinsi, dan pinjaman, atau bisa juga menggunakan total pendapatan secara keseluruhan sebagai pembagi. Rumus yang digunakan adalah $(PAD / (Dana\ Transfer + Pembiayaan)) \times 100\%$ atau $(PAD / Total\ Pendapatan) \times 100\%$. Skala yang digunakan adalah skala rasio.

Variabel selanjutnya yaitu Rasio Efektivitas PAD, digunakan untuk mengukur sejauh mana target pendapatan asli daerah dapat tercapai. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai target yang telah direncanakan sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah

$(Realisasi\ PAD / Target\ PAD) \times 100\%$. Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas yang baik dalam pengelolaan pendapatan daerah. Skala yang digunakan untuk variabel ini juga merupakan skala rasio.

Kemudian, variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah digunakan untuk menilai efisiensi pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah $(Realisasi\ Belanja / Anggaran\ Belanja) \times 100\%$. Rasio yang semakin kecil menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan anggaran. Variabel ini juga diukur dalam skala rasio.

Terakhir, terdapat variabel Rasio Kesenjangan Belanja Daerah, yang mengukur proporsi antara belanja operasional dengan total belanja daerah. Rasio ini penting untuk menganalisis apakah pemerintah daerah lebih fokus pada pengeluaran yang bersifat konsumtif (belanja operasional) atau produktif (belanja modal). Salah satu rumus yang digunakan adalah $(Belanja\ Operasional / Total\ Belanja\ Daerah) \times 100\%$. Nilai rasio yang

terlalu tinggi mengindikasikan dominasi belanja operasional, yang bisa berdampak kurang baik terhadap pembangunan jangka panjang. Skala pengukuran pada variabel ini juga menggunakan skala rasio.

Dengan adanya penjabaran operasionalisasi variabel tersebut, penelitian ini memiliki dasar yang kuat dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah secara objektif dan terukur.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 26*. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian (Sugiyono, 2017). Analisis ini akan diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesa. Uji asumsi yang digunakan adalah Uji Normalitas. Selanjutnya dilakkukan pengujian beda rata-rata (Uji -T) untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan antara provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2013) statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan sum). Teknik statistic deskriptif digunakan sebagai teknik analisis data pertama dalam penelitian ini. Statistik deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk menggambarkan variable penelitian.

3.5.2 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas yang membandingkan dua kelompok data untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogrov-Sminov. Jika data yang dievaluasi terdistribusi secara teratur atau signifikansinya lebih dari 0.05 persen maka uji statistik parametrik yang digunakan dalam pengujian hipotesis yaitu uji t dua sampel independent. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal atau signifikasinya kurang dari 0,05 persen, maka digunakan uji statistik non parametrik yang disebut uji Mann Whitney untuk pengujian hipotesis.

3.5.3 Uji Hipotesis

Independent Sample t Test

Independent Sample t Test atau Uji t dua sample bebas merupakan uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan dengan asumsi data terdistribusi normal. Apabila hasil uji signifikasinya menunjukkan sebesar $\alpha=5\%$, maka terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Sedangkan jika hasil uji probabilitas signifikasinya $>0,05\%$, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.

Man Whitney Test

Uji *Man Whitney Test* adalah uji statistic non-parametrik yang dapat digunakan sebagai pengganti uji-t dua sampel independent untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berhubungan dengan asumsi bahwa tidak terdistribusi normal. Terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan jika hasil uji signifikasi

menunjukkan 0,05, Sedangkan jika hasil uji probabilitas signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka rata-rata kedua kelompok sampel yang tidak berhubungan adalah sama atau tidak terdapat perbedaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Pulau Nusa Tenggara adalah wilayah yang terdiri dari dua provinsi terpisah, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masing -masing memiliki keunikan geografis dan budaya. Pulau Nusa Tenggara terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Sumba, dan juga memiliki posisi strategis yang mempengaruhi pola perdagangan dan pariwisata di kawasan tersebut. Koordinat geografis Pulau Nusa Tenggara berada pada rentang 8°S-11°S dan 118°E-122°E. Pulau Nusa Tenggara dikenal dengan keindahan alamnya, yang meliputi pantai-pantai eksotis, gunung berapi aktif, dan kawasan wisata yang terkenal seperti Lombok dan Gili Trawangan di NTB, serta Flores dan Komodo di NTT (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024b).

Penting untuk mengetahui karakteristik geografis dan demografis yang mempengaruhi kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Luas Wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km² (59,13%). Provinsi NTB memiliki kedudukan yang sangat strategis karena terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh-Kupang, Selat Lombok di sebelah barat dan selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis yang sangat ramai, dari arah Timur Tengah merupakan lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Selain itu juga wilayah NTB adalah lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya-Makasar) dan terletak pada daerah lintas wisata internasional, Bali-Komodo-Tanah Toraja sehingga dari sisi ekonomi sangat menguntungkan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022c).

Sedangkan Provinsi NTT memiliki kawasan perbatasan antar negara, yaitu wilayah kecamatan dan atau wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan negara Timor Leste. Provinsi NTT memiliki luas wilayah daratan yang meliputi 2 pulau seluas 48.718,10 km² (2,49%) luas Indonesia dan luas wilayah perairan kurang lebih 200.000 km² di

luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). NTT menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau pulau besar maupun pulau kecil, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya 946 pulau belum mempunyai nama, 44 pulau telah berpenghuni sedangkan selebihnya belum berpenghuni. Sementara itu, NTT lebih dominan dalam sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti jagung, padi, kopi dan kakao (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022a). Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan diikuti dengan tingkat pengangguran yang menurun setiap tahunnya. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang menurun juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat (Kennedy et al., 2019). Selain Provinsi Nusa

Tenggara Timur ada juga Provinsi Papua yang menduduki pertumbuhan ekonomi Fluktuatif.

Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua (setelah Greenland) di dunia yang berada di sebelah terbesar utara Australia. Pulau Papua dikenal di dunia Internasional dengan sebutan Nugini atau Guinea Baru. Pulau ini bentuknya mirip dengan *Paradisaeidae Helmii* (burung cendrawasih). Salah satu bentang alam di Pulau tersebut adalah gunung tertinggi di Indonesia, yaitu puncak Jaya (4.884 m). Luas wilayah Pulau Papua adalah 786.000 km persegi. Namun, yang menjadi bagian Indonesia hanya seluas 418.707,7 km persegi, dimana wilayah lainnya masuk Papua Nugini. Pulau Papua dibagi menjadi dua wilayah, yaitu bagian barat merupakan wilayah Indonesia dan bagian timur merupakan wilayah Papua Nugini. Mayoritas wilayahnya merupakan hutan hujan tropis yang terbentuk karena banyaknya lembah maupun pegunungan tinggi. Kondisi iklim di Papua cukup ekstrem dengan curah hujan mencapai 1800 mm hingga 3000 mm dengan kelembapan berkisar 80%-89%. Kondisi iklim tersebut ikut mempengaruhi penyebaran penduduk tidak

merata. Pulau Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki luas wilayah yang sangat besar dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah (Akram, 2023).

Provinsi Papua adalah provinsi di ujung timur Indonesia dengan luas wilayah 319.036,05 km². Provinsi Papua berbatasan dengan Samudra Pasifik di bagian utara dan Laut Arafuru di bagian selatan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat serta sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. Secara administratif Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota. Posisi geosstrategis Provinsi Papua yang terpisah jauh dari pulau-pulau utama Indonesia menyebabkan provinsi ini menghadapi masalah besar dalam aksesibilitas dan konektivitas. Papua memiliki beberapa tambang emas terbesar di dunia, termasuk Tambang Grasberg, yang merupakan salah satu aset terbesar dalam sektor ekonomi Indonesia. Namun, meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, Papua menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dan infrastruktur yang terbatas. Selain itu, Papua juga memiliki tingkat kemiskinan

yang tinggi, hal tersebut menjadi masalah besar dalam pengelolaan keuangan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022b) . Menurut Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Pemerintah Pusat, 2001), diberikan otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi ketertinggalan dalam berbagai sektor. Dicermati berdasarkan data anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejak tahun 2002-2022, besaran anggaran Otsus Papua cukup fleksibel dan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dana alokasi umum nasional yang dijadikan pembagi sebesar 2% untuk anggaran Otsus Papua selama 20 tahun (Prabowo et al., 2022).

Provinsi Papua Barat adalah provinsi Indonesia yang terletak di ujung Barat Pulau Papua. Wilayah administratif Provinsi Papua Barat terbagi dalam 13 Kabupaten dengan luas wilayah 102.955,15 km persegi. Adapun Kab. Manokwari merupakan Kabupaten dengan luas 14.250,94 km persegi (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2022). Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah dan status otonomi

khusus, namun mereka masih dihadapkan dengan berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks salah satunya yaitu kemiskinan, Papua Barat sampai saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan. Kesenjangan pendapatan yang terjadi di provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Papua Barat merupakan provinsi yang sedang berkembang, adapun perkembangan kondisi riil perkembangan tentunya peranan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan sangat penting, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data analisis regional tingkat kemiskinan provinsi Papua Barat berada pada posisi tertinggi kedua di Indonesia setelah provinsi Papua (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2022).

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis

deskriptif dapat diketahui melalui penjelasan berikut:

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Efektivitas, Efisiensi dan Keserasian Belanja Daerah Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviatio n
Rasio Derajat Desentralisa si Fiskal	1 6	.04	.43	.2075	.12288
Rasio Kemandirian	1 6	.04	.77	.2937	.21762
Rasio Efektivitas	1 6	.71	1.31	.9850	.17784
Rasio Efisiensi	1 6	2.19	12.38	5.831 9	3.40468

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-

Rasio	1	.59	.89	.7444	.08839
Keserasian	6				
BO					
Rasio	1	.08	.41	.2175	.09889
Keserasian	6				
BM					
Valid N	1				
(listwise)	6				

rata rasio derajat desentralisasi fiskal adalah 0,2075 termasuk dalam kategori cukup, nilai rata-rata rasio kemandirian adalah 0,2937 termasuk dalam kategori rendah dan dan pola hubungan konsultatif. Sedangkan rasio efektivitas bernilai rata-rata 0,9850 termasuk dalam kategori cukup efektif dan rasio efisiensi memiliki rata-rata 5,8319 termasuk dalam kategori tidak efisien. Sedangkan rasio keserasian terbagi mejadi dua perhitungan dimana rasio keserasian belanja operasi memiliki nilai rata-rata rasio adalah 0,7444 lebih besar dibanding nilai rata-rata rasio keserasian belanja modal adalah 0,2175 yang berarti nilai rasio keserasian termasuk dalam kategori kurang baik.

4.2.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Perbandingan Rata Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022

Provinsi di	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Nusa Tenggara	8	0,22	0,43	0,3100
Pulau Papua	8	0,04	0,20	0,1050

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perbandingan rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Papua. Provinsi Pulau Nusa Tenggara mempunyai nilai minimum sebesar 0,22 atau 22% yang diperoleh pada provinsi Nusa Tenggara Timur dan nilai maksimum 0,43 atau 43% yang diperoleh pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal provinsi Pulau Nusa Tenggara sebesar 0,3100 atau 31,00% dengan kriteria kemampuan keuangan

daerahnya sedang. Sedangkan kinerja keuangan provinsi Pulau Papua dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal mempunyai nilai minimum 0,04 atau 4% yang diperoleh pada provinsi Papua Barat dan nilai maksimum 0,20 atau 20% yang diperoleh pada provinsi Papua. Nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal provinsi Pulau Papua sebesar 0,1050 atau 10,50% dengan kriteria kurang kemampuan keuangan daerahnya.

4.2.3 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dan aktivitas pemerintahan . Berikut ini hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

Tabel 4. 3 Perbandingan Rata Rata Rasio Kemandirian antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022

Provinsi di	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Nusa Tenggara	8	0,28	0,77	0,4675
Pulau Papua	8	0,04	0,25	0,1200

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perbandingan rasio kemandirian provinsi Pulau Nusa Tenggara mempunyai nilai maksimum sebesar 0,77 atau 77% yang diperoleh pada provinsi Nusa Tenggara Barat dan nilai minimum 0,28 atau 28% yang diperoleh pada provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai rata-rata rasio kemandirian provinsi Nusa Tenggara sebesar 0,4675 atau 46,75% dengan kriteria konsultatif (rendah) sedangkan kinerja keuangan provinsi Pulau Papua sebesar 0,1200 atau 12,00% dengan kriteria instruktif (rendah sekali). Nilai maksimum provinsi Pulau Papua sebesar 0,25 atau 25% yang diperoleh pada provinsi Papua dan nilai minimum 0,04 atau 4% yang diperoleh pada provinsi Papua Barat.

4.2.4 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efektivitas:

Tabel 4. 4 Perbandingan Rata Rata Rasio Efektivitas antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022

Provinsi di	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Nusa Tenggara	8	0,71	1,06	0,8563
Pulau Papua	8	0,95	1,31	1,1138

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perbandingan rasio efektivitas provinsi Pulau Papua lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara. Provinsi Pulau Papua mempunyai nilai minimum sebesar 0,95 atau 95% yang diperoleh pada provinsi Papua Barat dan nilai maksimum 1,31 atau 131% yang diperoleh pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Nilai rata-rata rasio efektivitas provinsi Pulau Papua 1,1138 atau 111,38% dengan kriteria sangat efektif sedangkan kinerja keuangan provinsi Pulau Nusa Tenggara dilihat dari rasio kemandirian mempunyai nilai minimum 0,71 atau 71% yang diperoleh pada provinsi Nusa Tenggara Timur dan nilai maksimum 1,06 atau 106% yang diperoleh pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai rata-rata rasio

efektivitas provinsi Pulau Nusa Tenggara sebesar 0,8563 atau 85,63% dengan kriteria cukup efektif.

4.2.5 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah:

Tabel 4. 5 Perbandingan Rata Rata Rasio Efisiensi antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022

Provinsi di	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Nusa Tenggara	8	2,19	4,53	3,2013
Pulau Papua	8	5,08	12,38	8,4625

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perbandingan rasio efisiensi provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua terbilang tidak efisien. Karena semua persentasenya di atas 100%. Provinsi Pulau Nusa Tenggara mempunyai nilai minimum sebesar 2,19 atau 219% yang diperoleh pada provinsi Nusa Tenggara Barat dan nilai maksimum 4,53 atau 453% yang diperoleh pada Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Nilai rata-rata rasio efisiensi provinsi Pulau Nusa Tenggara 3,2013 atau 320,13% dengan kriteria tidak efisien sedangkan kinerja keuangan provinsi Pulau Papua dilihat dari rasio efisiensi mempunyai nilai minimum 5,08 atau 508% yang diperoleh pada provinsi Papua dan nilai maksimum 12,38 atau 1238% yang diperoleh pada provinsi Papua Barat. Nilai rata-rata rasio efisiensi provinsi Pulau Papua sebesar 8,4625 atau 846,25% dengan kriteria tidak efisien.

4.2.6 Rasio Keserasian BO

Rasio keserasian belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Terdapat dua cara perhitungan rasio keserasian belanja, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio keserasian belanja:

Tabel 4. 6 Perbandingan Rata Rata Rasio Keserasian Belanja Operasi antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022

Provinsi di	N	Minimum	Maximum	Mean
--------------------	----------	----------------	----------------	-------------

Pulau Nusa Tenggara	8	0,71	0,85	0,7837
Pulau Papua	8	0,59	0,89	0,7050

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Tabel 4. 7 Perbandingan Rata Rata Rasio Belanja Modal antara Provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua Tahun 2019-2022

Provinsi di	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Nusa Tenggara	8	0,13	0,28	0,1875
Pulau Papua	8	0,08	0,41	0,2475

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data perhitungan di atas menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi rasio keserasian belanja modal Pulau Nusa Tenggara dan Papua. Terlihat bahwa nilai rasio belanja operasi sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai rasio belanja modal. Dapat diketahui bahwa kinerja keuangan provinsi Pulau Nusa Tenggara dan Papua berdasarkan rasio keserasian belanja dengan kriteria kurang baik. Artinya bahwa pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Papua masih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal yang digunakan untuk pembangunan

daerah. Jumlah belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality							
	Provinsi	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	NTT dan NTB	.205	8	.200*	.901	8	.298
	Papua dan Papua Barat	.181	8	.200*	.955	8	.757
Rasio Kemandirian	NTT dan NTB	.204	8	.200*	.904	8	.313
	Papua dan Papua Barat	.165	8	.200*	.939	8	.597
Rasio Efektivitas	NTT dan NTB	.182	8	.200*	.961	8	.821
	Papua dan Papua Barat	.262	8	.114	.854	8	.105
Rasio Efisiensi	NTT dan NTB	.243	8	.182	.869	8	.147
	Papua dan Papua Barat	.203	8	.200*	.903	8	.310

Rasio Keserasian BO	NTT dan NTB	.183	8	.200*	.912	8	.371
	Papua dan Papua Barat	.144	8	.200*	.944	8	.646
Rasio Keserasian BM	NTT dan NTB	.252	8	.143	.848	8	.091
	Papua dan Papua Barat	.144	8	.200*	.932	8	.535
*. This is a lower bound of the true significance.							
a. Lilliefors Significance Correction							

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (Ghozali, 2018). Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam perhitungan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal berdistribusi secara normal. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel lolos uji normalitas data.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah data diuji normalitasnya dan memperoleh hasil bahwa data telah terdistribusi secara normal. Pengujian hipotesis bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata rasio keuangan antara pemerintah daerah di Pulau Nusa Tenggara dan Papua sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Hipotesis

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Rasio	Sig (2-tailed)	Keterangan
Derajat Desentralisasi Fiskal	0,000	Signifikan
Kemandirian	0,000	Signifikan
Efektivitas	0,001	Signifikan
Keserasian	0,000	Signifikan
Keserasian Belanja Operasi	0,073	Tidak Signifikan

Keserasian Belanja		
Modal	0,237	Tidak Signifikan

Berdasarkan Uji t-Test pada tabel didapatkan skor signifikan sebagai berikut:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal : 0,000 ($< 0,05$) artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal di pulau Nusa Tenggara dengan pulau Papua. Tingkat derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah provinsi di pulau Nusa Tenggara lebih baik dan berbeda secara nyata dibandingkan dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau Papua.
2. Rasio kemandirian : 0,000 ($< 0,05$) artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata rasio kemandirian di pulau Nusa Tenggara dengan pulau Papua. Tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau Nusa Tenggara lebih baik dan berbeda secara nyata dibandingkan dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau Papua.
3. Rasio efektivitas : 0,001 ($< 0,05$) terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata rasio efektivitas di pulau Nusa Tenggara

dengan pulau Papua. Tingkat efektivitas pemerintah daerah provinsi di pulau Papua lebih baik dan berbeda secara nyata dibandingkan dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau dan Nusa Tenggara.

4. Rasio efisiensi : 0,000 ($< 0,05$) artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata rasio efisiensi di pulau Nusa Tenggara dengan pulau Papua. Meskipun terdapat perbedaan pada nilai rata-rata rasio nya, tetapi tingkat efisiensi pemerintah daerah provinsi di pulau Nusa Tenggara dan Papua keduanya tidak efisien.
5. Rasio Keserasian BO: 0,073 ($> 0,05$) dan Rasio Keserasian BM 0,237 ($> 0,05$) artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata rasio keserasian pulau Nusa Tenggara dengan pulau Papua.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Perbedaan kinerja keuangan pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua dari aspek Derajat Desentralisasi Fiskal.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi derajat desentralisasi fiskal sebesar

0,000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua yang diukur dari rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal adalah terdapat perbedaan.

Derajat desentralisasi fiskal ditunjukkan oleh besar kecilnya perbandingan antara tingkat pendapatan awal daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD). Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil perhitungan rata-rata tingkat desentralisasi pulau Nusa Tenggara sebesar 0,3100 atau 31,00% sedangkan pulau Papua rata-rata tingkat desentralisasinya sebesar 0,1050 atau 10,50%. Hasil presentase tersebut dapat diketahui tingkat desentralisasi pada pulau Nusa Tenggara lebih baik dari pulau Papua. Pulau Nusa Tenggara memiliki kemampuan kinerja keuangan daerah dalam kategori sedang, karena dari hasil penelitian menggambarkan besarnya presentasi angka derajat desentralisasi fiskal adalah 30,01%-40,00%. Hal ini berarti PAD

pulau Nusa Tenggara harus ditingkatkan agar PAD angkanya tidak kalah besar dari total pendapatan daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Nusa Tenggara, berbagai strategi perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar tingkat kemandirian fiskal semakin membaik. Salah satu langkah utama yang dapat diambil adalah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Pulau Nusa Tenggara memiliki kekayaan alam dan sektor pariwisata yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal. Potensi wisata alam seperti pantai, pegunungan, dan budaya lokal yang unik dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak hotel, restoran, dan retribusi wisata.

Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Intensifikasi dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan pajak yang lebih transparan dan efisien, termasuk digitalisasi sistem pembayaran untuk meminimalkan kebocoran anggaran. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak,

misalnya dengan meninjau ulang potensi wajib pajak baru yang belum tergarap, baik dari sektor perdagangan, industri rumahan, maupun pelaku UMKM yang sedang tumbuh.

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD. Pelatihan dan penguatan kemampuan pegawai dalam bidang manajemen keuangan daerah, penggalian potensi ekonomi lokal, serta pelayanan publik akan menciptakan sistem administrasi yang lebih profesional dan responsif. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Penyediaan insentif atau kemudahan perizinan bagi investor lokal juga dapat menarik lebih banyak investasi yang berujung pada peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.

Pemerintah juga dapat mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih produktif dan kompetitif. Banyak BUMD yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD akibat lemahnya tata kelola dan model bisnis yang tidak adaptif. Revitalisasi BUMD melalui evaluasi

manajemen, penyusunan strategi bisnis baru, dan transparansi laporan keuangan akan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas BUMD, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Sedangkan pulau Papua memiliki kemampuan kinerja keuangan daerah dalam kategori kurang, karena dari hasil penelitian menggambarkan besarnya presentasi angka derajat desentralisasi fiskal adalah 10,01%-20,00%. Hal ini berarti PAD pulau Papua harus ditingkatkan agar PAD angkanya relatif besar atau tidak kalah besar dari total pendapatan daerah.

Langkah awal yang dapat diambil adalah mengembangkan sektor unggulan lokal yang sesuai dengan karakteristik Papua. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam seperti hasil hutan, perikanan, pertanian, serta tambang. Namun, selama ini sebagian besar pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan oleh pihak luar dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong lahirnya usaha lokal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang mengelola komoditas unggulan tersebut secara profesional dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Misalnya, melalui pengelolaan hasil laut oleh koperasi nelayan lokal, pengolahan sagu dan kakao, serta pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat.

Selain itu, peningkatan PAD di Papua harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah. Banyak potensi pajak daerah yang belum tergali maksimal akibat lemahnya sistem pendataan dan pemungutan. Pemerintah daerah dapat melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, termasuk sektor informal dan UMKM, serta mengintegrasikan sistem pajak dengan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak juga perlu digalakkan agar tercipta kesadaran kolektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga pengelola PAD juga merupakan faktor penting. Sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penempatan yang sesuai

kompetensi. Aparatur yang kompeten dan berintegritas akan mampu menyusun kebijakan fiskal yang efektif dan mengelola potensi daerah dengan lebih baik.

Papua juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata berbasis alam dan budaya, seperti Raja Ampat, Lembah Baliem, dan Danau Sentani. Pengembangan destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah daerah bisa menjadi sumber PAD baru melalui retribusi wisata, pajak hotel dan restoran, serta usaha ekonomi kreatif masyarakat sekitar (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2023)

4.5.2 Perbedaan Kinerja Keuangan Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua dari Aspek Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi kemandirian daerah sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua yang diukur dari rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah terdapat perbedaan.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan daerah) semakin rendah dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil perhitungan rata-rata tingkat kemandirian pulau Nusa Tenggara sebesar 0,4675 atau 46,75% sedangkan pulau Papua rata-rata tingkat kemandiriannya sebesar 0,1200 atau 12,00%. Hasil presentase tersebut dapat diketahui tingkat kemandirian pada pulau Nusa Tenggara lebih baik dari pulau Papua. Pulau Nusa Tenggara memiliki pendapatan asli daerah dengan kriteria rendah sehingga membentuk pola hubungan konsultatif dimana pemerintah daerah sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan tingkat kemandirian pada Pulau Papua memiliki pendapatan asli daerah dengan kriteria rendah sekali sehingga membentuk pola hubungan instruktif dimana pemerintah daerah masih belum mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua dapat dilakukan melalui beberapa cara strategis. Di Pulau Nusa Tenggara, otonomi daerah dapat ditingkatkan dengan memperkuat potensi lokal seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan agar menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih mandiri. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas aparatur dan transparansi pengelolaan anggaran (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Sementara itu, di Pulau Papua, pelaksanaan otonomi daerah perlu difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar ketergantungan terhadap dana pusat bisa dikurangi. Selain itu, pendekatan kultural yang menghormati kearifan lokal dan pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan menjadi penting agar otonomi daerah berjalan inklusif dan efektif. Kedua wilayah perlu dukungan pusat dalam bentuk pembinaan, bukan sekadar bantuan dana, agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar menghasilkan kemandirian (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023)

4.5.3 Perbedaan Kinerja Keuangan Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua dari Aspek Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi efektivitas daerah sebesar 0,001 ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua yang diukur dari rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah adalah terdapat perbedaan.

Rasio efektivitas menunjukkan perbandingan antara PAD yang diterima dengan target yang telah ditetapkan. Angka Rasio mendekati 100% berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah khususnya dalam mengelola keuangan daerah dan mencapai tujuannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas pulau Provinsi Nusa Tenggara sebesar 0,8563 atau 85,63% sedangkan pulau Papua rata-rata rasio efektivitas sebesar 1,1138 atau 111,38%. Hasil presentase tersebut dapat diketahui rasio efektivitas pada pulau Papua lebih baik dari pulau Nusa Tenggara. Pulau Papua memiliki angka rasio $>100\%$ maka dari itu

tergolong sangat efektif dimana pemerintah daerah sangat mampu untuk memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan. Sedangkan rasio efektivitas pada pulau Nusa Tenggara memiliki angka rasio kisaran 75%-89% yang berarti tergolong kurang efektif dimana pemerintah daerah belum bisa memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan.

Cara memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif di Pulau Nusa Tenggara, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi lokal seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi wilayah ini. Pengembangan destinasi wisata unggulan seperti Labuan Bajo dan Mandalika dapat dikombinasikan dengan penarikan retribusi yang transparan dan adil. Selain itu, penerapan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi akan meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran pendapatan. Kepatuhan wajib pajak juga harus ditingkatkan melalui edukasi, insentif bagi yang taat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pemerintah daerah juga dapat memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) di sektor strategis agar mampu menyumbang PAD secara signifikan. Tak kalah penting, kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas lokal dalam pengelolaan aset daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan-pendekatan ini akan mendukung kemandirian fiskal daerah dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di Pulau Nusa Tenggara (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022a).

4.5.4 Perbedaan Kinerja Keuangan Pulau Provinsi Nusa Tenggara dan Pulau Papua dari aspek Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi efisiensi daerah sebesar 0,001 ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua yang diukur dari rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah adalah terdapat perbedaan.

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%.

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil perhitungan rata-rata rasio efisiensi pulau Nusa Tenggara sebesar 3,2013 atau 320,13% sedangkan pulau Papua rata-rata rasio efisiensi sebesar 8,4625 atau 846,25%. Hasil presentase tersebut dapat diketahui kedua pulau tersebut tidak efisien karena semua presentasenya diatas atau lebih besar dari 100%. Hal ini berarti pemerintah daerah pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua tidak efisien dalam mengelola keuangan daerah, dimana biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan yang diperoleh. Pulau Papua dan Pulau Nusa Tenggara harus mengelola keuangan daerah secara efisien dapat menerapkan strategi, setiap alokasi anggaran harus dikaitkan dengan target capaian kinerja yang jelas dan terukur, sehingga pengeluaran daerah lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (Hadi et al., 2022).

4.5.5 Perbedaan Kinerja Keuangan Pulau Nusa Tenggara

dan Pulau Papua dari Aspek Keserasian Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi Rasio Keserasian Belanja Operasi: 0,073 ($> 0,05$) dan rasio keserasian belanja modal 0,237 ($> 0,05$) artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata rasio keserasian pulau Nusa Tenggara dengan pulau Papua.

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil perhitungan pada pulau Nusa Tenggara untuk rasio keserasian belanja Operasi 0,7837 atau 78,37% dan rasio keserasian belanja modal 0,1875 atau 18,75%, presentase tersebut menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi rasio keserasian belanja modal pulau Nusa Tenggara. Sedangkan hasil perhitungan pada pulau Papua untuk Rasio Keserasian Belanja Operasi 0,7050 atau 70,50% dan rasio belanja modal 0,2475 atau 24,75%, presentase tersebut menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi rasio keserasian belanja modal pulau Papua.

Berdasarkan data perhitungan di atas menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi rasio keserasian belanja modal pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua. Terlihat bahwa nilai rasio belanja

operasi sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai rasio belanja modal. Dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua berdasarkan rasio keserasian belanja dengan kriteria kurang baik. Artinya bahwa pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua masih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah. Jumlah belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal, untuk meningkatkan belanja modal daerah di Pulau Nusa Tenggara, pemerintah daerah perlu mengambil sejumlah langkah strategis agar anggaran lebih banyak diarahkan ke investasi pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik (K et al., 2024)

Dalam penelitian ini, Uji Mann-Whitney tidak digunakan karena analisis yang dilakukan sudah cukup diselesaikan dengan pendekatan uji beda yang lebih sesuai dengan karakteristik data dan tujuan penelitian. sehingga uji beda parametrik seperti *Independent Sample t-Test* dinilai lebih tepat dan efisien. Selain itu, penggunaan uji beda juga memberikan interpretasi yang lebih

langsung terhadap perbedaan rata-rata antar kelompok, sesuai dengan kebutuhan analisis yang diangkat dalam studi ini. Oleh karena itu, Uji Mann-Whitney dianggap tidak lagi relevan dan tidak digunakan dalam proses analisis data penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD pulau Nusa Tenggara lebih baik daripada pulau Papua. Kemandirian pemerintah daerah pulau Nusa Tenggara lebih baik dibandingkan pulau Papua. Efektivitas pemerintah pulau Papua lebih efektif daripada pulau Nusa Tenggara, sedangkan tingkat efisiensi pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua keduanya tidak efisien. kinerja keserasian belanja antara pulau Nusa Tenggara dan pulau Papua hasil perhitungan dari rasio keserasian belanja kedua pulau tersebut memperoleh kriteria kurang baik. Karena nilai belanja operasi sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai rasio belanja modal. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan kedua pulau masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi agar tujuan dibentuknya otonomi daerah dapat terwujud.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil analisis. Pertama, data yang

digunakan hanya bersumber dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Pulau Nusa Tenggara dan Papua selama periode tahun 2019 hingga 2022, sehingga analisis rasio keuangan yang dilakukan bersifat deskriptif dan tidak mencerminkan keseluruhan kondisi ekonomi daerah yang dinamis. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor eksternal seperti kebijakan fiskal nasional, kondisi geografis, sosial, serta politik yang juga berpengaruh terhadap rasio keuangan daerah. Oleh karena itu, hasil dan simpulan penelitian ini sebaiknya dipandang sebagai gambaran umum yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan penelitian adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi kasus dengan obyek dan rentang waktu penelitian yang berbeda agar dapat diperoleh hasil yang lebih luas tentang dampak pemekaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Baik Pemerintah pulau Nusa Tenggara ataupun pulau Papua agar mengoptimalkan perolehan PAD melalui penggalian sumber-sumber baru penerimaan daerah kendati jumlah bantuan dana dari pemerintah pusat masih cukup besar
3. Baik Pemerintah pulau Nusa Tenggara ataupun pulau Papua agar memperbesar alokasi belanja modal yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana ekonomi serta layanan publik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Baik Pemerintah pulau Nusa Tenggara ataupun pulau Papua harus mengelola keuangan daerah secara efisien dapat menerapkan strategi, setiap alokasi anggaran harus dikaitkan dengan target capaian kinerja yang jelas dan terukur, sehingga pengeluaran daerah lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, P. (2023). *Luas pulau Papua dan Maluku, batas dan kondisi geografisnya*. Gramedia Blog.
- Anggun, S. D. Irawan, D. (2023). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Smart: Sosial Ekonomi Dan Kerakyatan*, 1(1), 47–62.
- Asri, G. S. W. (2022). *Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Cilacap*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022a). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022*. 91, 0–3.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022b). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022c). *Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2022).
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022. 1–2.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2023).
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. 91.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, &
INDONESIA, R. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas*
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022.
2.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024a). *Ekonomi Indonesia*
Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi
Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-
Q). 6 Mei.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024b). *Provinsi Nusa Tenggara*
Timur Dalam Angka 2024. BPS.

Eko Amanda, & Zulgani. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan
Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di
Kabupaten Musi Rawas Periode 2007-2011. *Jurnal*
Manajemen Terapan Dan Keuangan, 9(2), 129–139.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v9i2.12042>

- Falih, M. Z., & Nurmiati, S. (2024). Pengembangan aplikasi analisis kinerja keuangan berbasis rasio untuk mendukung pengambilan keputusan. *Rekayasa Informasi*, 13(1), 54–60.
- Hadi, I. Kemandirian, R. (2022). *Trilogi accounting and business research*. 03(02), 213–222.
- Hadi, I., & Khotimah, H. (2022). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Pulau Jawa Dan Sumatera. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 213–222.
<https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1409>
- Haryono, F. Saragih, G. M. (2023). Implikasi rasionalisasi retribusi bagi daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum UNRI*, 12(2), 195–212.
- Irnawati, saripuddin D, Z. A. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Makasar*. 4(3), 403–416.
- Jarkasih, M. Rachmawati, I. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan*. 1–9.

- K, F. L. Lopian, A. L. C. P. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Papua Barat*. 24(1), 25–36.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Kennedy, P. S. J. , A. (2019). Isu strategis kesenjangan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 619–629.
- Machmoed, A. A. N. Ratulangi, U. S. (2021). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. 21(03), 80–90.
- Maharani, R. Sastrawan, E. (2023). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya menuju kemandirian daerah provinsi Sulawesi Tengah. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(2), 186–196.
- Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah edisi dua*. 65–77.
- Meinasari A, A., Harsanto, N. (2022). Arah baru hubungan

keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah: sentralisasi atau desentralisasi. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 1–23.

Monalisa, M., & Indriasari, D. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan analisis pertumbuhan dan rasio keuangan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 1062–1071. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.462>

Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>

Pemerintah Pusat. (1974). *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974>

Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>

Pemerintah Pusat. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. In *UU No 21 tahun 2001 Otonomi Khusus* (Issue

September, p. 4).

Pemerintah Pusat. (2004a). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>

Pemerintah Pusat. (2004b). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Pemerintah Pusat. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>

Pemerintah Pusat. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Prabowo, M. A. Prabowo, M. A. (2022). Akuntansi politik: faktor politik dalam pengelolaan anggaran otonomi khusus Papua. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(2), 89–101.

<https://doi.org/10.30813/jab.v15i2.2924>

- Puspita Geatri Br Perangin-Angin Wira, R. (2023). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 173–183.
- Rahayu, C. D. S. & Y. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan komisariss independen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 182–189.
- Ramadhian, F. N. Putera, R. E. (2023). Perbandingan pola rekrutmen kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 133–149. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.133-149.2023>
- Santoso, R. T. Hasanah, N. (2021). Analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.325>
- Siagian, P. A (2023). Analisis dampak pembangunan proyek perumahan Medan Resort City (Merci) terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar Kec. Deli Tua. *Jurnal Sains Dan ...*, 5(2), 574–580.
- Sugianto, B. Abbas, Z. (2020). Otonomi daerah dan peluang investasi untuk percepatan pembangunan. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 66–74.

<https://doi.org/10.46839/Iljih.v0i0.286>

Suriadi, H. Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 27–36.
<https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>

Syukur. (2021). *Analisis kinerja keuangan sebagai barometer kinerja pemerintah daerah kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. 2(32), 152–165.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

Wibawa, G. R., & Arif. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat*. 3(2), 88–100.

Yuniza, M. E. Inggarwati, M. P. (2022). Refocusing policy of local government activities and budget reallocation during the Covid-19 pandemic. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 199–213.
<https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1037>

Yurika Aulia Silvia Nurhaliza. (2024). Transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>